



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: 9
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Agama RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Kamis, 25 Juni 2020.
Waktu	: Pukul 10.00 WIB.
Tempat	: Virtual / Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2021 dan RKP Tahun 2021 (RKA K-L dan RKP K-L Tahun 2021). 2. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2019.
Ketua Rapat	: H.YANDRI SUSANTO, S.Pt.
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 47 dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 3 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Menteri Agama RI Beserta Jajaran.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.21 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Yandri Susanto, S.Pt dengan didampingi Wakil Ketua H.M.R. Ihsan Yunus, ME.Con.,Std, Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA. dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.
3. Rapat di Skors pada Pukul 12.00 WIB dan di lanjutkan Pukul 13.10 WIB.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama RI dengan agenda membahas “**Pembicaraan Pendahuluan RAPBN dan RKP Kementerian Agama RI Tahun 2021, Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2019, dan Pelaksanaan APBN Tahun 2020**”, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI belum dapat menyetujui dan meminta penjelasan lebih lanjut mengenai anggaran dan program Pagu Indikatif Kementerian Agama RI dalam RAPBN Tahun 2021.

Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama RI untuk mengevaluasi dan meninjau kembali rencana program dan anggaran dalam Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2021 dan usulan tambahannya agar lebih fokus pada peningkatan kualitas fungsi agama dan pendidikan keagamaan, seperti anggaran Tunjangan Profesi Guru, *inpassing*, pemberian bantuan dalam penanggulangan dampak wabah Covid-19 untuk ustadz dan tenaga pendidik keagamaan, peningkatan sarana-prasarana madrasah, pesantren, pendidikan keagamaan, tempat ibadah, dan PTKIN.

2. Komisi VIII DPR RI telah mendapatkan penjelasan dari Menteri Agama RI mengenai realisasi anggaran Kementerian Agama RI pada APBN Tahun 2019 sebesar Rp63.946.369.726.231,- (*enam puluh tiga triliun sembilan ratus empat puluh enam miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah*) atau 96,28% dari total anggaran Rp66.418.765.942.000,- (*enam puluh enam triliun empat ratus delapan belas miliar tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah*).

3. Komisi VIII DPR RI mendorong peningkatan serapan anggaran Kementerian Agama RI Tahun 2020 yang sampai tanggal 24 Juni 2020 baru mencapai Rp24.722.066.897.378,- (*dua puluh empat triliun tujuh ratus dua puluh dua miliar enam puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah*) atau 38,69% dari total pagu anggaran Rp63.892.252.719.000,- (*enam puluh tiga triliun delapan ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah*).

Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Agama RI untuk melakukan realokasi anggaran pada APBN Tahun 2020 guna peningkatan sarana-prasarana tempat ibadah dan pendidikan keagamaan yang terdampak wabah Covid-19.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.35 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**



H. YANDRI SUSANTO, Spt.